

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat (Waluyo,2011). Pemerintah selalu mengupayakan penerimaan yang maksimal. Namun bagi wajib pajak, akan selalu mengupayakan pembayaran yang seminimal mungkin. Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia yang disebabkan oleh perdagangan bebas, hal tersebut akan berpengaruh di bidang ekonomi dan dunia usaha kemudian perkembangan perekonomian tersebut juga diikuti dengan perkembangan kebijakan di bidang perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan negara akan lebih optimal, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Sebagai respon terhadap perubahan, maka DPR melakukan penyesuaian kebijakan yaitu UU no.28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakann, UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Suhartono dan Ilyas,2010).

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assesment*, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan memiliki berbagai

kewajiban di bidang perpajakan. Namun seringkali undang-undang tersebut berubah-ubah menyebabkan WP OP maupun WP Badan memiliki persepsi yang tidak sesuai dengan kebijakan yang dibuat, maka diperlukan perencanaan pajak untuk membuat jumlah pajaknya benar dan dapat menghemat pajak.

Perusahaan seharusnya mempunyai tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk dapat menciptakan kesejahteraan pemegang saham, perusahaan dituntut agar memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan beroperasi pada tingkat produktifitas yang optimal. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, dan pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011). Perencanaan pajak harus memahami aspek administratif dan material. Aspek formal merupakan aspek yang terkait dengan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan SPT, disamping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh Wajib Pajak. Sedangkan aspek material adalah aspek yang terkait dengan pelaporan dengan benar dan lengkap.

PT. Jogja Trans Tugu merupakan perusahaan yang berusaha dibidang transportasi. Perusahaan ditunjuk oleh pemerintah Dinas Perhubungan untuk melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum “ *Buy The Service* ” berdasarkan kontak kerja dengan Pemerintah Dinas Perhubungan selama tujuh tahun. Pada tahun 2012, perusahaan melakukan kerjasama dengan

pemerintah, mengoperasikan 54 bus. Bus tersebut sebagian milik pemerintah sebanyak 20 bus, sedangkan perusahaan memiliki 34 bus. Walaupun tidak semua bus tersebut milik perusahaan, namun beban pajak atas bus tersebut ditanggung oleh perusahaan. perusahaan tersebut telah menjalankan kewajibannya di bidang perpajakan. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada profit perlu menerapkan sistem perencanaan pajak. Perencanaan pajak memiliki dua tujuan, yaitu membuat jumlah pajak yang terhutangnya menjadi benar dan menghemat jumlah pajak. Untuk itu perencanaan dimaksudkan agar sumberdaya yang ada di perusahaan akan teralokasi dengan tepat sesuai dengan aturan perpajakan, pada akhirnya perusahaan tidak perlu mengeluarkan sumber daya lebih, sehingga laba perusahaan dapat dimaksimalkan. Berdasarkan temuan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan Perencanaan Pajak Pada PT Jogja Tugu Trans ”.

1.2 Rumusan Masalah

Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dan memenuhi semua kewajiban dibidang perpajakan. Pajak merupakan beban bagi perusahaan, beban pajak akan mengurangi kemampuan perusahaan. Sehingga dengan perencanaan pajak bisa meminimalkan beban pajak dan memenuhi kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu. Pokok permasalahan dalam penelitian adalah : “Apakah perencanaan pajak dapat meminimalkan beban pajak terutang pada PT. Jogja Tugu Trans ?”

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian adalah :

1. Pajak Penghasilan yang akan dibahas adalah Pajak penghasilan Badan karena Pajak penghasilan Badan merupakan pajak yang harus ditanggung oleh badan atau perusahaan dan bebannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
2. Dibatasi pada laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi dan Neraca) pada tahun 2012 dan catatan-catatan laporan keuangan lainnya.
3. Perencanaan pajak yang dilakukan menggunakan data historis, karena penulis tidak bisa mendapatkan data perencanaan perusahaan pada tahun mendatang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan masukan strategi perencanaan pajak yang diterapkan pada perusahaan PT. Jogja Tugu Trans sehingga bermanfaat untuk penghematan jumlah pajak yang terutang dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1. Kegunaan Praktis

Sebagai praktik lapangan untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan sebagai pembandingan antara teori dan praktek yang ada, dan berguna untuk memberikan gambaran atau

wawasan yang jelas tentang penerapan perencanaan pajak sebagai strategi untuk penghematan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak badan.

1.6 Metodologi Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan pada perusahaan PT Jogja Tugu Trans yang beralamat di Jl Raya Yogyakarta Km 4,5 24-B Banguntapan, Yogyakarta.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan PT Jogja Tugu Trans tahun 2012

3. Data yang Digunakan

Data yang digunakan adalah data primer yang berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dan data arsip yang berupa :

1. Laporan keuangan perusahaan tahun 2012
2. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan (SPT 1771 Tahun 2012).

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi : yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa bahan-bahan dan dokumen-dokumen.

- b. Wawancara : yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

5. Analisis Data

- a. Mengevaluasi Laporan Keuangan Fiskal PT Jogja Trans Tugu
- b. Melakukan perencanaan pajak melalui :
 - a. Pengelompokan aset berdasarkan undang-undang, dan metode yang digunakan dalam penyusutan aset tetap oleh perusahaan:
Metode Garis Lurus

Dalam metode garis lurus, beban penyusutan aset tetap pertahunnya akan sama sampai akhir umur ekonomis aset tersebut.
 - b. Evaluasi biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
 - c. Membuat Perencanaan Pajak berdasarkan laporan keuangan PT Jogja Tugu Trans
 - d. Menghitung penghematan pajak setelah perencanaan pajak

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, data yang digunakan, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum perusahaan.

Bab IV Analisis Data

Pada bab ini akan membahas analisis data yang diperoleh, untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran yang diberikan kepada perusahaan yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajak.